

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.¹

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian.² Dalam hal ini agar fungsi perencanaan kegiatan publik serta alat pengendalian dapat berjalan dengan baik, maka dalam proses anggaran harus dilakukan secara sistematis dan benar. Sistem penganggaran sektor publik dalam sejarahnya berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan masyarakat.³

Pergeseran sistem penganggaran di Indonesia dari sistem anggaran tradisional ke sistem anggaran yang berorientasi pada publik atau sistem anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*). Dalam penganggaran dengan sistem tradisional banyak terdapat kekurangan dalam proses penganggarannya ditandai dengan penyusunan anggaran cenderung sentralistis, bersifat spesifikatif, dan juga bersifat tahunan tanpa memperhitungkan rencana-rencana anggaran untuk jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya sistem anggaran yang berorientasi pada publik ditandai dengan berorientasi pada pemberian desentralisasi, menekankan pada prinsip nilai uang (*value for money*). UU No. 17/2003 mengamanatkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan prestasi kerja.

Sistem anggaran berdasarkan prestasi kerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem anggaran yang disusun untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional, yaitu tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.⁴ Oleh karenanya, setiap anggaran yang disusun harus memiliki tolok ukur atas kinerja yang akan dicapai. Dimana nantinya bisa dilihat kinerja anggarannya telah berjalan dengan baik atau belum, karena untuk melihat kinerja anggaran dari sebuah organisasi tidak cukup hanya dari serapan atau realisasi anggarannya saja.

Terkait dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah mengenai anggaran berbasis

kinerja yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007.

Di Pemerintahan kota Padang proses penganggarannya juga didukung dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Ini dapat dilihat bahwa Kecamatan juga telah menyusun anggarannya dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Dengan adanya peraturan mengenai sistem anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan pemerintah Kota Padang dapat meningkatkan program/kegiatan untuk pembangunan kota Padang serta peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat khususnya pemerintah Kecamatan.

Mengenai peran kecamatan setelah menjadi SKPD sangat signifikan apabila dihubungkan dengan meningkatnya dana pusat yang diberikan pemerintah daerah pada Tahun 2006. Kabupaten/Kota dituntut untuk mampu mengoptimalkan dana yang diberikan kepada daerah dengan memaksimalkan kecamatan. World Bank menyebut desentralisasi Indonesia pada Tahun 2001 sebagai *Big bang*? (benturan hebat), pertama karena telah merubah wajah Negara yang paling tersentralisasi menjadi yang terdesentralisasi di dunia. Setelah lima tahun berjalan, terjadi "*big bang*" yang kedua dengan meningkatnya aliran dana lewat Dana Alokasi Umum (DAU) sampai 64% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya kewenangan dan dana yang dimiliki pemerintah daerah ini, memberikan tantangan tersendiri bagi daerah untuk mengelola kecamatan sebagai unit strategis melakukan proses

pelayanan publik. Pada titik inilah, peningkatan peran kecamatan menjadi krusial dan sangat diperlukan untuk mendorong segi-segi kemajuan pemerintah daerah.⁵

Selanjutnya pengaturan Kecamatan pada Undang-undang No 34 Tahun 2004 dengan mempertahankan pola sesuai Undang-undang No 22 Tahun 1999 dimana camat tidak lagi menjadi kepala wilayah tetapi ditempatkan setara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam instansi sektoral sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007. Posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum (Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007) :

Perangkat daerah kabupaten/ kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan?

Pemerintah Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dalam hal ini bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan serta melaksanakan pembangunan untuk kemajuan Kota Padang. Mengingat bahwa Kecamatan Padang Barat, yang mana terletak dipusat kota Padang yang juga mencakup wilayah perdagangan, pendidikan, industri kecil, serta sektor pariwisata.⁶ Dalam hal ini Kecamatan Padang Barat sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan Kota Padang tetapi pada saat ini

pusat pemerintahan Kota Padang dipindahkan ke Kecamatan Koto Tengah disebabkan Kecamatan Padang Barat termasuk kawasan yang rentan terhadap ancaman bencana. Meskipun Kecamatan Padang Barat saat ini bukan pusat Pemerintahan Kota Padang, tetapi Kecamatan Padang Barat sendiri banyak mendapatkan prestasi-prestasi baik di lingkungan pemerintahan Kota Padang maupun prestasi di tingkat Nasional, salah satunya yaitu Kecamatan Padang Barat pernah mendapatkan penghargaan mengenai Kecamatan yang disiplin laporan anggarannya terbaik dibandingkan 10 Kecamatan yang lain.⁷ Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Kota Padang dalam pelayanan, pemberdayaan serta pembangunan daerah masing-masing khususnya kecamatan mendapatkan anggaran, anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing kecamatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel 1.1
Alokasi Anggaran Per-Kecamatan Pemerintah Kota Padang
Tahun Anggaran 2012

No.	Kecamatan	Alokasi Anggaran
1.	Padang Barat	Rp. 7.387.799.845,88
2.	Padang Timur	Rp. 7.133.789.003,00
3.	Padang Utara	Rp. 5.902.977.627,92
4.	Padang Selatan	Rp. 5.518.236.932,18
5.	Nanggalo	Rp. 5.295.058.813,26
6.	Lubuk Kilangan	Rp. 5.141.105.887,38
7.	Lubuk Begalung	Rp. 6.372.723.986,70
8.	Kuranji	Rp. 7.091.501.031,00
9.	Pauh	Rp. 6.048.975.791,28
10.	Koto Tengah	Rp. 9.366.831.465,33
11.	Bungus Teluk Kabung	Rp. 4.225.807.888,64

Sumber : Dokumen APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2012

Berdasarkan tabel 1.1, alokasi anggaran per-kecamatan dilingkungan pemerintahan Kota Padang, dapat dilihat alokasi anggaran terbesar pada Pemerintah Kecamatan Koto Tangah sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kecamatan Koto Tangah sekarang merupakan pusat Pemerintahan Kota Padang, selanjutnya alokasi anggaran nomor dua terbesar didapat oleh Pemerintah Kecamatan Padang Barat. Dalam hal ini Kecamatan Koto Tangah mendapatkan alokasi anggaran terbesar, tetapi dalam penelitian ini peneliti lebih memilih Kecamatan Padang Barat sebagai *locus* penelitian peneliti, pemilihan Kecamatan Padang Barat sebagai *locus* oleh peneliti tidak terlepas dari prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Kecamatan Padang Barat yang sebagaimana telah peneliti sebutkan diatas, salah satunya dalam hal anggaran yaitu Kecamatan Padang Barat merupakan Kecamatan yang disiplin laporan anggarannya terbaik diantara 10 Kecamatan yang lain.

Selanjutnya pembiayaan anggaran Kecamatan Padang Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang dari tahun anggaran 2010-2012 :

Tabel 1.2
Jumlah APBD dan anggaran Kecamatan Padang Barat Tahun 2010 ? 2012

Tahun	APBD Kota Padang	Anggaran Kecamatan Padang Barat	%
2010	Rp 1.186.311.389.887,12	Rp 6.693.623.142,96	0,54
2011	Rp 1.282.995.439.093,91	Rp 6.383.612.565,55	0,50
2012	Rp 1.549.382.274.370,86	Rp 7.387.799.845,88	0,48

Sumber : Diolah peneliti dari dokumen Anggaran Pemerintahan Kota Padang Tahun Anggaran 2010, tahun anggaran 2011, tahun anggaran 2012

Berdasarkan tabel 1.2, persentase anggaran Kecamatan Padang Barat dari APBD Kota Padang cenderung mengalami penurunan, tetapi alokasi anggaran

cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun anggaran 2012 anggaran Kecamatan Padang Barat hanya mendapat 0,48% dari total APBD kota Padang, tetapi untuk alokasi anggaran pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 7. 387.799.845,88 dari dua tahun sebelumnya. Dari data APBD Kota Padang tersebut dapat dilihat alokasi anggaran yang didapatkan Kecamatan Padang Barat dari tahun anggaran 2010 hingga tahun anggaran 2012. Selanjutnya anggaran Kecamatan Padang Barat pada tahun 2012 berdasarkan anggaran perubahan APBD Kota Padang untuk Kecamatan Padang Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Gambaran Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012
Di Kecamatan Padang Barat

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/ berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
<u>KOTA PADANG</u>				
		-	-	-
1.	PENDAPATAN	Rp. 1.427.574.128.719,50	Rp. 1.452.057.931.175,95	1,72
	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 202.965.240.082,95	Rp. 187.627.806.660,95	(7,56)
	B. DANA PERIMBANGAN	Rp. 994.053.098.640,00	Rp. 1.009.846.442.202,00	1,59
	C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 230.555.789.996,55	Rp. 254.583.682.313,00	10,42
2.	BELANJA DAERAH	Rp. 1.447.287.005.827,50	Rp. 1.533.282.274.370,86	3,79
	A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 912.076.038.492,50	Rp. 985.207.769.213,31	8,02
	B. BELANJA LANGSUNG	Rp. 565.210.967.335,00	Rp. 548.074.505.157,55	(3,03)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(Rp. 49.712.877.108,00)	(Rp. 81.224.343.194,91)	63,39
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 49.712.877.108,00	Rp. 81.224.343.194,91	63,39
	A. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 65.812.877.108,00	Rp. 81.224.343.194,91	63,39
	B. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 65.812.877.108,00	Rp. 81.224.343.194,91	63,39
<hr/>				
<u>KECAMATAN PADANG BARAT</u>				
1.	PENDAPATAN	-	-	-
2.	BELANJA DAERAH	Rp. 7.199.406.353,88	Rp. 7.387.799.845,88	2,62 %
	A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 5.701.062.353,88	Rp. 5.762.133.295,88	1,07 %
	1. Belanja Pegawai	Rp. 5.701.062.353,88	Rp. 5.762.133.295,88	1,07 %
	B. BELANJA LANGSUNG	Rp. 1.498.344.000,00	Rp. 1.618.192.800,00	8,00 %
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 297.790.000,00	Rp. 357,297,000,00	19,98 %

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	1.500.000,00	Rp.	1.500.000,00	-
b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	Rp.	77.940.000,00	Rp.	77.940.000,00	-
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	7.595.000,00	Rp.	25.000.000,00	229,16 %
d. Penyediaan Barang Cetakan	Rp.	39.600.000,00	Rp.	53.000.000,00	33,84 %
e. Penyediaan Peralatan dan Perengkapan	Rp.	96.850.000,00	Rp.	96.850.000,00	-
f. Penyediaan Bahan Bacaan	Rp.	12.600.000,00	Rp.	12.600.000,00	-
g. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.	20.000.000,00	Rp.	20.000.000,00	-
h. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp.	20.000.000,00	Rp.	46.635.000,00	133,18 %
i. Penyediaan Peralatan Kebersihan	Rp.	3.200.000,00	Rp.	3.200.000,00	-
j. Peningkatan Peralatan dan Administrasi	Rp.	17.500.000,00	Rp.	19.572.000,00	11,81%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp.	135.960.000,00	Rp.	176.770.000,00	30,02 %
a. Pemeliharaan berkala rumah dinas	Rp.	3.000.000,00	Rp.	3.000.000,00	-
b. Pemeliharaan berkala gedung kantor	Rp.	15.000.000,00	Rp.	15.000.000,00	-
c. Pemeliharaan berkala kendaraan dinas	Rp.	112.960.000,00	Rp.	136.450.000,00	20,79 %
d. Pemeliharaan berkala peralatan	Rp.	17.320.000,00	Rp.	17.320.000,00	-
e. Pemeliharaan berkala mebeleur	Rp.	5.000.000,00	Rp.	5.000.000,00	-
3. Program Peningkatan isiplin Aparatur	Rp.	22.000.000,00	Rp.	22.000.000,00	-
a. Pengadaan pakaian khusus	Rp.	22.000.000,00	Rp.	22.000.000,00	-
4. Program Penigkatan Sistem Capaian Kinerja	Rp.	10.000.000,00	Rp.	10.000.000,00	-
a. Penyusunan laporan kinerja	Rp.	10.000.000,00	Rp.	10.000.000,00	-
5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan	Rp.	6.000.000,00	Rp.	6.000.000,00	-
a. Koordinasi lintas kelembagaan	Rp.	6.000.000,00	Rp.	6.000.000,00	-
6. Program Pengembangan Kecamatan	Rp.	845.401.000,00	Rp.	824.084.000,00	(2,52 %)
a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Rp.	194.565.000,00	Rp.	200.512.500,00	3,06 %
b. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan	Rp.	64.251.000,00	Rp.	64.251.000,00	-
c. Stimulan Kecamatan	Rp.	75.000.000,00	Rp.	75.000.000,00	-
d. Pengembangan administrasi Pemerintahan	Rp.	61.585.000,00	Rp.	61.585.000,00	-
e. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan	Rp.	200.000.000,00	Rp.	172.735.000,00	(13,63%)
f. Stimulan Kelurahan	Rp.	250.000.000,00	Rp.	250.000.000,00	-
7. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.	181.193.000,00	Rp.	229.515.550,00	-

Sumber : Diolah peneliti dari dokumen Penjabaran perubahan APBD Kota Padang Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, alokasi anggaran yang berasal dari APBD Kota Padang tahun 2012 setelah perubahan anggaran, dimana alokasi belanja daerah untuk Kecamatan Padang Barat meningkat sebesar 2,62 % atau Rp 7.387.799.845,88. Dan alokasi anggaran setelah perubahan APBD Kota Padang pada tahun 2012 untuk belanja langsung dan tidak langsung juga mengalami kenaikan setelah adanya perubahan anggaran.

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Padang Barat Sebelum Perubahan dan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2010-2012

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Belanja Tidak Langsung/ Tahun			
	2010	Rp. 4.912.414.990,00	Rp. 4.938.354.342,96	0,53%
	2011	Rp. 4.849.425.784,00	Rp. 5.053.868.415,55	4,21 %
	2012	Rp. 5.701.062.353,88	Rp. 5.762.133.295,88	1,07 %
2.	Belanja Langsung/ Tahun			
	2010	Rp. 1.791.110.800,00	Rp. 1.755.268.800,00	2,00 %
	2011	Rp. 1.095.647.500,00	Rp. 1.329.744.150,00	21,37 %
	2012	Rp. 1.498.344.000,00	Rp. 1.618.192.800,00	8,00 %

Sumber : Diolah peneliti dari dokumen Anggaran Pemerintahan Kota Padang Tahun Anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011, Tahun anggaran 2012

Dari Tabel 1.4, menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2010 anggaran yang dianggarkan setelah perubahan yaitu Rp. 4.938.354.342,96 adanya peningkatan sebesar 0,53 %, pada Tahun Anggaran 2010 terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada belanja tidak langsung kecamatan Padang Barat sebesar 4,216 %, dengan anggaran setelah perubahan Rp. 5.053.868.415,55, selanjutnya pada Tahun Anggaran 2012 mengalami peningkatan 1,071 %. Pada anggaran belanja langsung anggaran setelah perubahan pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.755.268.800,00 sedangkan anggaran belanja langsung pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.329.744.150,00

ini berarti terjadi penurunan sebesar 24,24 %. Selanjutnya pada tahun 2012 anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.618.192.800,00 ini berarti mengalami peningkatan sebesar 21,69% dari anggaran setelah perubahan Tahun Anggaran 2011. Dengan adanya peningkatan alokasi anggaran tersebut maka setidaknya kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Barat harus sesuai juga dengan anggaran yang didapatkan.

Kecamatan yang pada proses penganggarannya juga telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja yang mana sistem anggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas.⁸ Penetapan anggaran untuk program dan kegiatan masih didasarkan dengan pola menambah atau mengurangi besarnya item belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini berimplikasi pada penyerapan dana yang tidak efisien dan efektif karena tidak didasarkan pada capaian kinerja dari program dan kegiatan sehingga terkesan adanya celah penyimpangan penggunaan anggaran.⁹ Mengenai hal tersebut dimana untuk melihat kinerja anggaran dari sebuah instansi Pemerintah tidak hanya berdasarkan serapan anggaran saja tetapi harus juga dilihat dari keterkaitan antara tujuan dari penggunaan anggaran dengan pelaksanaan anggaran.

Perlunya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran juga disampaikan oleh Mahyeldi Ansharullah Wakil Walikota Padang, yang mana menyatakan bahwa :

Kita tidak ingin terdapat sisa lebih anggaran yang sangat banyak. Seperti tahun 2011 lalu, Silpa mencapai Rp 97,324 miliar. Sejumlah SKPD tidak mampu merealisasikan pekerjaan sesuai target yang ditetapkan. Ke depan, kita akan beri sanksi bagi SKPD yang serapannya anggarannya rendah.¹⁰

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh wakil walikota padang tersebut, ini terlihat bahwa terdapatnya silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) yang besar, ini mengindikasikan bahwa tidak tercapainya program/kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah Kota Padang pada tahun 2011 yang lalu. Dimana ini berimbas pada kinerja anggaran pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Tabel 1.5
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Kecamatan Padang Barat Tahun Anggaran 2010-2012

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Realisasi	
1.	Belanja Tidak Langsung/ Tahun				
		2010	Rp. 4.938.354.342,96	Rp.4.836.639.679,00	97,94 %
		2011	Rp. 5.053.868.415,55	Rp.4.945.874.115,00	97,86 %
		2012	Rp. 5.762.133.295,88	Rp. 5.530.785.778,00	95,99 %
2.	Belanja Langsung/ Tahun				
		2010	Rp. 1.755.268.800,00	Rp. 1.744.226.252,00	99,37 %
		2011	Rp. 1.329.744.150,00	Rp. 1.250.508.708,00	94,04 %
		2012	Rp. 1.618.192.800,00	Rp. 1.540.783.923,00	94,78 %

Sumber : Diolah peneliti dari dokumen Anggaran Pemerintahan Kota Padang Tahun Anggaran 2010, tahun anggaran 2011, tahun anggaran 2012

Dari data yang ada dapat dilihat pada tabel 1.5, pada belanja tidak langsung Kecamatan Padang Barat menunjukkan tingkat realisasi anggaran tahun 2010 sebesar

97,94% yang menunjukkan adanya sasaran pada program/kegiatan yang belum tercapai sebesar 2,06%, pada tahun 2011 tingkat realisasi anggarannya sebesar 97,86% yang menunjukkan adanya sasaran pada program/kegiatan yang belum tercapai sebesar 2,14%, selanjutnya tahun 2012 realisasi anggaran tahun tersebut sebesar 95,99% yang menunjukkan adanya sasaran pada program/kegiatan yang belum tercapai sebesar 4,01 %.

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 realisasi anggaran mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut menunjukkan adanya sasaran pada program/kegiatan yang belum tercapai sebesar 4,01 %, pada Pemerintah Kecamatan Padang Barat pada tahun 2012 bahwa anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan yaitu sebesar Rp. 5.762.133.295,88, tetapi pada kenyataannya realisasi anggaran yang dapat dicapai hanya sebesar Rp. 5.530.785.778,00, maka dalam hal ini pada tahun 2012 terdapat beberapa persen anggaran yang tidak dapat digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Kecamatan Padang Barat, bahwa beliau menyatakan realisasi anggaran Kecamatan Padang Barat memang mengalami penurunan pada tahun 2012 dibandingkan 2 tahun sebelumnya dan juga ada beberapa kegiatan/ program yang tidak terlaksana dengan semestinya, salah satu hal penyebabnya yaitu kurangnya kesigapan aparatur dalam pelaksanaan anggaran.¹¹

Tabel 1.6
Daftar Program Pemerintah Kecamatan Padang Barat Tahun 2012

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Administrasi Perkantoran	11 Kegiatan	Rp 297.790.000,.
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4 Kegiatan	Rp 136.200.000,.
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Kegiatan	Rp 22.000.000,.
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan	Rp 10.000.000,.
5.	Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan	1 Kegiatan	Rp 6.000.000,.
6.	Program Pengembangan Kecamatan	6 Kegiatan	Rp 848.901.000,.
7.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan	Rp 181.193.000,.

Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan dokumen Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Kecamatan Padang Barat Tahun 2012

Dari data pada tabel 1.6, merupakan daftar program/ kegiatan pada Pemerintah Kecamatan Padang Barat tahun 2012, dari daftar program/ kegiatan Pemerintah Kecamatan Padang Barat, program/ kegiatan Pengembangan Kecamatan mendapatkan anggaran yang paling besar dibandingkan program/kegiatan lainnya yaitu sebesar Rp 848.901.000, sedangkan program/ kegiatan yang mendapatkan anggaran paling kecil yaitu koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan sebesar Rp. 6.000.000, untuk melihat kinerja anggaran Pemerintah Kecamatan Padang Barat peneliti hanya mengambil satu program yaitu program pengembangan kecamatan, pemilihan program pengembangan kecamatan sendiri ini lebih kepada anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program/ kegiatan mendapatkan anggaran yang besar dibandingkan program/ kegiatan lainnya.

Tabel 1.7
Program/ Kegiatan Pengembangan Kecamatan Pemerintah
Kecamatan Padang Barat

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Kecamatan	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	200,512,500	198,237,500
	Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan	64,251,000	63,215,000
	Dana Stimulan Kecamatan	75,000,000	71,330,000
	Pengembangan Administrasi Pemerintahan	61,585,000	55,855,000
	Peningkatan Infrastruktur Kecamatan	172,735,500	164,500,000
	Dana Stimulan Kelurahan	250,000,000	249,225,000

Sumber : Dokumen realisasi anggaran Kecamatan Padang Barat Tahun 2012

Berdasarkan tabel 1.7 diatas, merupakan program Pengembangan Kecamatan Pemerintah Kecamatan Padang Barat, kegiatan yang dilaksanakan pada program ini sebanyak enam kegiatan yaitu pengembangan sosial kemasyarakatan, Pengembangan ekonomi kemasyarakatan, Dana stimulan Kecamatan, Administrasi Pemerintahan, Peningkatan Infrastruktur Kecamatan, Dana stimulan Kelurahan .

Berdasarkan masalah-masalah atau kekurangan yang dipaparkan di atas mengenai anggaran, yaitu masalah realisasi atau penyerapan anggaran di Pemerintah Kecamatan Padang Barat. Masalah tersebut adalah realisasi anggaran yang cenderung menurun selama tiga tahun terakhir terutama realisasi anggaran tahun 2012, dengan menurunnya tingkat realisasi anggaran maka mengakibatkan adanya program/kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana dengan semestinya dan berakibat pada menurunnya kinerja dari Pemerintah Kecamatan Padang Barat. Maka perlu adanya gambaran mengenai proses penganggaran di Pemerintah Kecamatan Padang Barat tahun 2012 apakah kinerja anggarannya telah maksimal atau belum.

Dalam hal ini peneliti menggunakan elemen anggaran kinerja yang dikemukakan oleh Hadriyanus Suharyanto, yang mana pada elemen anggaran kinerja terdiri dari Standar Analisa Belanja (SAB), Indikator Kinerja serta Satuan biaya/Harga.

Maka dari itu langkah selanjutnya yaitu analisis terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah Kecamatan Padang Barat tahun 2012. Berdasarkan konsep kinerja anggaran menurut LAN kinerja anggaran merupakan pencapaian sasaran terhadap keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran. Analisis terhadap kinerja anggaran ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan anggaran yang direncanakan dengan hasil pelaksanaan anggaran di Pemerintah Kecamatan Padang Barat tahun 2012 tersebut sehingga nantinya dapat diketahui bahwa kinerja anggarannya telah baik atau belum.

Maka dari itu penelitian ini sangat penting dilaksanakan karena untuk menilai hasil kinerja setiap SKPD tidak hanya dilihat dari realisasi anggaran yang digunakan, atau seberapa besar SKPD tersebut dapat menghabiskan anggaran, tetapi lebih kepada kesesuaian anggaran pada kebijakan-kebijakan perencanaan yang dibuat oleh SKPD dalam dokumen-dokumen perencanaan oleh SKPD tersebut dan yang lebih penting anggaran tersebut digunakan untuk keperluan masyarakat atau anggaran tersebut lebih banyak dianggarkan untuk aparatur dan internal SKPD Pemerintah Kecamatan Padang Barat. Maka dari itu berdasarkan deskripsi yang telah peneliti gambarkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti anggaran di Kecamatan Padang Barat dengan judul :**Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah Kecamatan Padang Barat Kota Padang Tahun 2012?**

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan terhadap anggaran yang efektif dan efisien dapat dilihat dari kinerja anggarannya. Dalam penganggaran yang berbasis kinerja dapat dilihat dari tolok ukur kinerja yang dihasilkan melalui pelaksanaan realisasi anggaran, terdapatnya keterkaitan yang jelas antara kebijakan dengan dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola oleh satuan kerja yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Kecamatan Padang Barat salah satu SKPD yang bertugas membantu kepala daerah dalam urusan otonomi daerah khususnya meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan urusan otonomi daerah tersebut Kecamatan Padang Barat mendapatkan anggaran yang berasal dari dana APBD. Mengenai hal tersebut dalam 3 tahun yaitu tahun anggaran 2010-2012 yang dialokasikan untuk kecamatan Padang Barat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi dalam realisasi anggaran khususnya pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu **bagaimana kinerja anggaran pada pemerintah Kecamatan Padang Barat ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Kinerja Anggaran pada Pemerintah Kecamatan Padang Barat Tahun 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah khususnya dalam realisasi anggaran terhadap program-program yang dilakukan pemerintah terutama program yang berkaitan dengan masyarakat.
2. Secara akademis diharapkan dapat memberikan masukan untuk peneliti dalam melakukan penelitian sejenis dan ataupun lanjutan, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik kepentingan akademis maupun untuk kepentingan pribadi.

1.5 Sistematika Penelitian

1.5.1 Bab I Pendahuluan

Bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

1.5.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini mendeskripsikan mengenai penelitian terdahulu yang relevan, teori dan konsep yang digunakan, skema pemikiran penelitian, Konsep yang peneliti pakai digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja anggaran pemerintah kecamatan padang barat tahun 2012.

1.5.3 Bab III Metode Penelitian

Bab ini mendeskripsikan mengenai metode penelitian yang peneliti pakai dalam melakukan penelitian yang terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, peranan peneliti, proses penelitian, unit analisis, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data.

1.5.4 Bab IV Deskripsi Lokasi

Bab ini mendeskripsikan tentang lokasi penelitian untuk mendukung penjelasan terhadap masalah yang diteliti.

1.5.5 Bab V Temuan dan Analisis Data

Bab ini menjelaskan temuan dan analisis data yang di temukan di lapangan selama peneliti melakukan penelitian.

1.5.6 Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas permasalahan yang diteliti.